

**Pengaruh Dinamika Sistem Perekonomian dan Kebijakan
Moneter yang Berlaku di Indonesia sejak Orde Lama
hingga Orde Reformasi terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Nasional**



Oleh :

Ninda Anggriani	(201310180311064)
Syela Kurniawati	(201310180311097)

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN AJARAN 2015**

Kata Pengantar

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	
Daftar Isi.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Rumusan Masalah.....	
1.3 Tujuan.....	
BAB II : SISTEM EKONOMI DI INDONESIA	
2.1 Sistem Ekonomi Periode Orde Lama.....	
2.2 Sistem Ekonomi Periode Orde Baru.....	
2.3 Sistem Ekonomi Periode Orde Reformasi.....	
2.3.1 Masa Pemerintahan B.J Habibie.....	
2.3.2 Masa Pemerintahan Abdurahman Wahid.....	
2.3.3 Masa Pemerintahan Megawati.....	
2.3.4 Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.....	
BAB III : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONETER	
3.1 Kebijakan Moneter di Masa Orde Lama.....	
3.2 Kebijakan Moneter di Masa Orde Baru.....	
3.3 Kebijakan Moneter di Masa Reformasi.....	
3.3.1 Masa Pemerintahan B.J Habibie.....	
3.3.2 Masa Pemerintahan Abdurahman Wahid.....	
3.3.3 Masa Pemerintahan Megawati.....	
3.3.4 Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.....	
BAB IV : PERTUMBUHAN DAN STABILISASI EKONOMI DI INDONESIA	
4.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Masa Orde Lama.....	
4.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Masa Orde Baru.....	
4.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Masa Orde Reformasi.....	
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kestabilan Ekonomi.....	
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	
5.2 Saran.....	
Daftar Pustaka.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak kemerdekaan negara ini, sistem ekonomi selalu menjadi topik yang patut didiskusikan dalam berbagai kesempatan. Diskusi-diskusi tersebut pada umumnya diselenggarakan dalam rangka menemukan sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.

Sesungguhnya, yang diinginkan dan yang ingin dicapai dari berlangsungnya diskusi-diskusi mengenai sistem ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan negara. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Hal ini harus benar-benar dilakukan karena arahan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi di Indonesia sudah jelas dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan*". Sehingga jika kita menerjemahkan secara harfiah adalah perekonomian yang diinginkan oleh pendiri negara kita dan pembuat Undang-Undang Dasar 1945 adalah perekonomian yang berasas kebersamaan dan kekeluargaan. Namun dalam prakteknya, implementasi dari pasal tersebut belum benar-benar terlaksana. Terbukti dari masih banyaknya kemiskinan dan kelaparan yang menjadi permasalahan yang tak kunjung mendapatkan solusi.

Sistem perekonomian di dalam suatu negara tentunya harus disesuaikan dengan landasan ideologi negara tersebut. Sehingga akan ada korelasi dan hubungan yang akan memiliki *impact* terhadap negara dan masyarakat dalam satu wilayah negara tersebut.

Sistem perekonomian di Indonesia sejak kemerdekaan hingga reformasi telah banyak melahirkan kebijakan dan perencanaan ekonomi yang bertujuan sama, yaitu untuk mencapai kesejahteraan. Namun, hingga saat ini kita masih belum sampai pada "sejahtera" itu sendiri, karena banyaknya masalah baik internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan guncangan ekonomi di Indonesia.

Implementasi kebijakan, baik kebijakan moneter dan kebijakan fiskal masih belum dapat dikatakan berhasil dalam membangun perekonomian negara ini, dalam karya tulis ini kami akan membahas sistem perekonomian yang diberlakukan di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi beserta kebijakan moneter yang dijalankan dan melihat keberhasilan masing-masing orde tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan pada kombinasi sistem ekonomi dan kebijakan moneter yang dijalankan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sistem ekonomi apa yang diberlakukan di masa Orde Baru hingga Orde Reformasi?
2. Kebijakan moneter seperti apa yang dijalankan di masa Orde Baru hingga Orde Reformasi?

3. Berapa tingkat pertumbuhan ekonomi di masing-masing orde dan dapatkah dikatakan itu berhasil mencapai kesejahteraan ekonomi Indonesia?
4. Bagaimana situasi diluar ekonomi yang mempengaruhi kestabilan ekonomi di masing-masing orde?
5. Apa kelemahan dan keunggulan sistem ekonomi dan kebijakan moneter yang berlaku di orde-orde tersebut dalam perannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui sistem ekonomi yang diberlakukan di masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.
2. Untuk mengetahui kebijakan moneter yang dijalankan di masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi.
3. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di masing-masing orde dan dapatkah dikatakan itu berhasil mencapai kesejahteraan ekonomi Indonesia.
4. Untuk mengetahui situasi diluar ekonomi yang mempengaruhi kestabilan ekonomi di masing-masing orde.
5. Untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan sistem ekonomi dan kebijakan moneter yang berlaku di orde-orde tersebut dalam perannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BAB II

SISTEM EKONOMI DI INDONESIA

Sistem ekonomi memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertian sistem secara umum. Yaitu, sistem adalah suatu bangunan atau entitas yang tersusun dari sub-sub sistem yang saling berkaitan sehingga membentuk pola kerja yang holistik.

Sistem ekonomi juga merupakan entitas yang tersusun dari elemen-elemen yang saling berinteraksi sehingga sampai batas tertentu membentuk sebuah jaringan kerja yang konsisten dalam kehidupan ekonomi.¹

Berikut ini adalah beberapa sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia sejak periode Orde Lama hingga Orde Reformasi.

2.1 Sistem Ekonomi Periode Orde Lama

Pada masa Orde Lama banyak dokumen yang difungsikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang di sahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPR-S). Meskipun begitu, dokumen-dokumen tersebut umumnya berasal dari pidato presiden Soekarno yang kemudian di sahkan oleh MPRS menjadi dokumen resmi negara.

Di antara sekian banyak pidato dan tulisan presiden Soekarno, sosialisme Indonesia merupakan dokumen yang penting dilihat dari prespektif sistem ekonomi.

Sosialisme Indonesia adalah suatu ajaran dan gerakan tentang tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan sosialisme Indonesia bersendi pokok pada Keadilan, Kerakyatan dan Kesejahteraan. Unsur-unsur keadilan, Kerakyatan dan Kesejahteraan yang terkandung dalam asas-asas kekeluargaan dan gotong royong merupakan ciri-ciri pokok kepribadian Indonesia, seperti yang dirumuskan dalam Pancasila.

Sosialisme Indonesia bertujuan menagkhiri dan melenyapkan segala penderitaan rakyat lahir batin, dan memberikan nikmat rohaniyah dan badaniyah dengan menciptakan tata masyarakat Indonesia dalam wadah negara Indonesia. Ciri pokok sosialisme Indonesia adalah perpaduan antara unsur sosialisme, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan, dan unsur kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong-royong.

Disebutkan bahwa ekonomi sosialis Indonesia berpedoman pada pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Segala kegiatan produksi baik yang diusahakan oleh negara maupun swasta harus ditujukan pada kepentingan rakyat, terutama kebutuhan pokok hidup agar setiap warga negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka.
2. Seluruh kegiatan distribusi diatur sedemikian rupa sehingga barang-barang keperluan hidup sehari-hari dapat sampai dengan cepat merata dan murah di tangan rakyat.

¹ Ismail, Munawar. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Halaman 16

3. Segala kegiatan pertanian dan industri dibawa pada tingkat dimana Ekspor Indonesia meningkat menjadi ekspor barang-barang jadi.
4. Segala kegiatan impor ditujukan pada barang-barang yang dapat menambah produksi barang dalam negeri.
5. Negara harus segera memulai dengan membangun industri, khusus industri dasar, karena dengan tidak adanya industri dasar, semboyan untuk memenuhi kebutuhan sendiri merupakan semboyan yang tidak mungkin dilaksanakan.

Didalam sosialisme Indonesia, kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun pelaku swasta juga diberi peran yang besar. Pembagian peran diantara pelaku ekonomi didasarkan pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Negara menguasai lapangan perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Produksi, pengangkutan, dan distribusi barang penting diselenggarakan oleh negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai negara.
3. Pemerintah daerah dianjurkan bergerak dalam ketiga lapangan produksi, pengangkutan, dan distribusi.
4. Koperasi dianjurkan bergerak di segala lapangan terutama sektor distribusi.
5. Pihak swasta diberikan tempat yang layak dalam sektor produksi dan sektor pengangkutan.

2.2 Sistem Ekonomi Periode Orde Baru

Orde baru memiliki dokumen pembangunan yang lebih sistematis dan terperinci daripada Orde Lama. Dengan semangat untuk senantiasa konstitusional rezim Orde Baru menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pembangunan di semua lapangan kehidupan. Setiap lima tahun dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap GBHN untuk disesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, esensi sistem ekonomi pada masa Orde Baru tersurat dalam GBHN.

Menurut Orde Baru GBHN adalah haluan negara dalam garis-garis besar yang pada hakikatnya adalah suatu pola umum pembangunan nasional yang ditetapkan oleh MPR. Sedangkan pola umum pembangunan nasional merupakan serangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus menerus untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang di maksud dalam UUD 1945. Secara lebih terperinci, pola umum pembangunan nasional kemudian di jabarkan kedalam 3 tingkatan pembangunan yang saling terkait yaitu:

1. Pola dasar pembangunan nasional menguraikan pokok-pokok konsepsi pembangunan nasional
2. Pola umum pembangunan jangka panjang, menguraikan pokok-pokok konsepsi pembangunan nasional jangka panjang (25-30 tahun)
3. Pola umum pembangunan lima tahun menguraikan pokok-pokok konsepsi pembangunan nasional lima tahunan.

Dasar pemikiran diuraikannya pola umum pembangunan nasional ke dalam tiga konsepsi secara berjenjang adalah agar jalannya pembangunan

dapat di capai secara bertahap dan berlanjut sehingga memiliki arah yang jelas menuju tujuan nasional. Tujuan ditetapkan GBHN adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan, baik dalam jangka lima tahun maupun dalam jangka 25 tahun, sehingga cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dapat dicapai, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

GBHN bukan semata konsep pembangunan ekonomi, melainkan konsep pembangunan semua bidang kehidupan. Meskipun begitu, sepanjang pemerintah Orde Baru bidang Ekonomi merupakan bidang prioritas utama pembangunan. Keberadaannya melebihi kedudukan bidang-bidang lainnya. Dari pembangunan bidang ekonomi diharapkan dapat dihasilkan sumber daya dan peluang yang lebih luas bagi pembangunan bidang-bidang lainnya.

Demokrasi ekonomi dijadikan sebagai kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman bagi penentuan kebijakan ekonomi. Demokrasi ekonomi dirumuskan secara lebih jelas dan lengkap dengan penambahan ciri-ciri bahwa perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional, dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi yang harus dihindarkan hal-hal berikut ini:

1. Sistem *free fight liberalism*
2. Sistem etatisme
3. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dengan berbagai bentuk monopoli (pembeli tunggal) yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Selanjutnya, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur kebijakan operasionalisasi pembangunan bertumpu pada trilogi pembangunan, dimana ketiga unsurnya adalah:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya mengandung arti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah tanah air dan bahwa hasil-hasilnya pun harus dirasakan oleh rakyat secara adil dan merata dalam arti bahwa setiap warga negara harus menerima hasil pembangunan yang layak bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya kepada bangsa dan negara. Untuk melaksanakan pemerataan tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan 8 jalur pemerataan, yaitu:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya sandang, papan dan pangan
2. Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita

7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
8. Pemerataan memperoleh keadilan

Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis memiliki arti bahwa:

1. Stabilitas adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang mantap, aman, tentram dan tertib
2. Sehat dimaksudkan bahwa kondisi tersebut harus tercipta atas dasar aturan yang disepakati secara nasional dan timbul secara wajar dari kesadaran yang dalam sehingga mendorong dinamika
3. Dinamis diartikan bahwa dalam kondisi tersebut tetap berkembang kreativitas dan otonomitas masyarakat yang memungkinkan peningkatan produktivitas nasional ²

2.3 Sistem Ekonomi Periode Orde Reformasi

2.3.1 Masa Pemerintahan B.J Habibie

2.3.2 Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

2.3.3 Masa Pemerintahan Megawati

2.3.4 Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MONETER

3.1 Kebijakan Moneter di Masa Orde Lama

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

1. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3. Kas negara kosong.
4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

² Ibid 1

2. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
5. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
6. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.
Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat: sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

- a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
- b) Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
- c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
- d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
- e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
 Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
 a) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut : Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
 b) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.
 c) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
 Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

3.2 Kebijakan Moneter di Masa Orde Baru

1. Devaluasi rupiah terhadap USD sebesar 31% dari USD1 = Rp. 970 menjadi USD1 = Rp. 1.270
2. Tidak menaikkan suku bunga instrumen moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pengaliran dana serta memperbaiki posisi neraca pembayaran.

3.3 Kebijakan Moneter di Masa Reformasi

3.3.1 Masa Pemerintahan B.J Habibie

3.3.2 Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

3.3.3 Masa Pemerintahan Megawati

3.3.4 Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

BAB IV

PERTUMBUHAN DAN STABILISASI EKONOMI DI INDONESIA

5.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Masa Orde Lama

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tahun-tahun pertama setelah merdeka/keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk/ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagnasi. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar, kegiatan produksi sektor pertanian dan sektor industri manufaktur praktis terhenti. Tingkat inflasi sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 500% menjelang akhir periode orde lama. Semua ini disebabkan karena berbagai macam faktor yang penting di antaranya pendudukan Jepang, perang dunia ke-II, perang revolusi dan manajemen ekonomi makro yang sangat buruk. Dari tahun 1949 hingga tahun 1956 pemerintah Indonesia menerapkan satu sistem politik yang disebut demokrasi liberal. Setelah itu terjadi transisi ke sistem politik yang disebut “demokrasi terpimpin” yang berlangsung dari tahun 1957 hingga tahun 1965. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Sektor formal/modern, seperti pertambangan, distribusi, transportasi, bank, pertanian komersial, yang memiliki kontribusi lebih besar dari pada sektor informal/tradisional terhadap output nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor.

5.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Masa Orde Baru

Rezim Orde Baru mampu mengimplementasikan konsep pembangunannya dengan baik untuk waktu yang lebih lama. Keberhasilan ekonomi yang luar biasa. Indonesia diubah dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara berswasembada pangan dalam waktu yang tidak lama. Angka kemiskinan turun secara tajam, dari hampir lebih dari 50 persen penduduk pada awal Orde Baru menjadi sekitar 15 persen pada awal tahun 1990-an. Bank Dunia menyebut keberhasilan Orde Baru sebagai keajaiban ekonomi.

Sejak bulan Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintah Indonesia mulai menjalin kembali hubungan dengan lembaga dunia seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Sebelum Repelita dimulai pemerintah melakukan pemulihan ekonomi, sosial dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasarannya adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun secara bertahap dan target – target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Menjelang akhir tahun 1960-an atas kerjasama dengan Bank Dunia, IMF, ADB, dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut IGGI yang terdiri dari sejumlah negara maju termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi Indonesia.

5.3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Masa Orde Reformasi

5.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kestabilan Ekonomi

Daftar Pustaka

Curriculum Vitae

Nama : Ninda Anggriani
TTL : Malang, 12 Maret 1995
Alamat : Jl. Suropati Pesanggrahan – Batu.
No.Hp : 081249655537
Email : nindaanggria1203@gmail.com

Nama : Syela Kurniawati
TTL : Malang, 9 Desember 1995
Alamat : Jl. Perum Dewi Sartika 3H Temas - Batu
No.Hp : 088803306438
Email : syela_kurnia@yahoo.com

